

Implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran rumah sakit

Dr. A. Demir¹, Dr. S. Kaya^{1*}

¹ Faculty of Medicine and Clinical Research Center, Hacettepe University, Ankara, Türkiye

Info Artikel

Keywords:
Implementation, Transparency, Accountability, BOS Funds.

Abstract

Application of the Principles of Transparency and Accountability in the Management of BOS funds at SDN 104 / II Sungai Pinang Muara Bungo. This study aims to determine the Application of the Principle of Transparency and Accountability in the Management of BOS funds at SDN 104 / II Sungai Pinang, Knowing the obstacles and efforts to overcome these obstacles. The method used is Qualitative Descriptive Study aims to describe the problem of the phenomenon that occurs as problem solving based on facts and impacts. The study population is the Principal, Teachers, Administrative Staff, Student Guardians, School Committees, Operators with the Analysis Unit of 10 people with Purposive Sampling techniques. The results of the research show that in the Implementation of the Transparency and Accountability Principle in the Management of BOS Funds, it is in accordance with the technical guidelines issued by the government. involving guardians of students because schools follow technical instructions issued by the government which are carried out in the preparation of BOS Funds. For this reason, it is recommended that technical guidelines follow the theories in Transparency and Accountability.

Keywords: Implementation, Transparency, Accountability, BOS Funds.

Abstrak

Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan dana BOS di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan dana BOS di SDN 104/II Sungai Pinang, Mengetahui hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatannya. Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan Studi Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan masalah terhadap fenomena yang terjadi sebagai pemecahan masalah berdasarkan fakta dan dampak. Populasi Penelitian yaitu Kepala Sekolah, Guru, Staff Tata Usaha, Wali Murid, Komite Sekolah, Operator dengan Unit Analisis sebanyak 10 orang dengan teknik Purposive Sampling. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pelaksanaan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan pemerintah, tetapi dalam proses penganggaran wali murid dan masyarakat tidak diikutsertakan, yang ikut hanya Guru, Bendahara, Komite, Kepala Sekolah, sekolah tidak melibatkan wali murid karena sekolah mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilakukan dalam penyusunan Dana BOS. Untuk itu disarankan agar petunjuk teknis mengikuti teori yang ada dalam Transparansi dan Akuntabilitas.

Kata Kunci: Penerapan, Transparansi, Akuntabilitas, Dana BOS.

1. Pendahuluan

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu unsur dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sektor publik yang mempunyai masalah tentang pengelolaan keuangan ataupun pembiayaan pendidikan yang dituntut untuk melibatkan peran para pemangku kepentingan yaitu orang tua siswa, warga sekolah dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan merealisasikan guna menjadi kebutuhan lembaga pendidik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pada BAB XIII tentang Pendanaan Pendidikan, bagian ketiga Pasal 48 ayat (1) berbunyi bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.¹ Keadilan adalah meletakkan segala sesuatu sesuai pada porsinya. Efisiensi adalah berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Transparansi adalah keterbukaan, dalam bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan suatu kegiatan, dan akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawab. Dalam penelitian ini kenapa yang dipilih hanya transparansi dan akuntabilitas karena didalam pengelolaan keuangan transparansi dan akuntabilitas saling berkaitan. transparansi adalah keterbukaan sedangkan akuntabilitas adalah dapat ditanggung jawabkan. Oleh sebab itu, di dalam pengelolaan keuangan sekolah tidak semua sekolah mau menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan tidak semua sekolah mau memberi data tentang keuangan di sekolahnya untuk diakses oleh *stakeholder*, dan karna itu lah peneliti tertarik membahas tentang transparansi dan akuntabilitas di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 49 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Pengelolaan satuan pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.”² Pada pasal 53 ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.³ Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.⁴ Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pengelolaan dana BOS merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan perencanaan.⁵

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Mini Jaya Abadi, Jakarta, 2003, hal, 32.

²Perundangan tentang *Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional* 2013, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal, 172.

³*Ibid*, hal, 174.

⁴Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2014*, hal, 2.

⁵E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal, 48.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2015 pasal 2 bagian (a) menyatakan bahwa penggunaan dana BOS tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun secara efektif dan efisien, serta bagian (b) menyatakan pertanggung jawaban keuangan dana BOS dilaksanakan sesuai dengan dan berdasarkan tertib administrasi transparansi, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan dalam keuangan dana BOS.⁶

Transparansi adalah suatu keadaan di mana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna *stakeholder*.⁷ Transparansi sekolah adalah keadaan di mana setiap orang yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Transparansi dimaksudkan tanpa adanya sedikitpun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah. Sekolah harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya kepada publik. Transparansi akan memberi dampak dan konsekuensi adanya kontrol dari publik dan pihak terkait pada pengelolaan pendidikan (*stakeholders*).

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam penyelesaian tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.⁸ Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah.

Berdasarkan pengamatan dilapangan yang telah dilakukan peneliti, bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 104/II Sungai Pinang terdapat dugaan dalam penerapan prinsip transparansi, yakni dalam penyusunan keuangan baru melibatkan tim manajemen sekolah seperti; (Kepala Sekolah, Guru dan Bendahara). Namun dalam penyusunan kebutuhan anggaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah, pihak guru dan komite harus membuat usulan anggaran atau rencana yang akan dimasukkan ke dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Dalam pelaksanaan anggaran sekolah pihak guru, komite, wali murid, tokoh masyarakat harus mengetahui anggaran kemana sajakah anggaran sekolah digunakan. Dalam evaluasi anggaran secara umum, sekolah tidak melibatkan wali murid dalam proses penganggaran yang menyebabkan mereka tidak mengetahui pasti dana itu digunakan. yang mengetahui pasti tentang keuangan itu hanya kepala sekolah, guru, dan bendahara.

Tabel 1
Dana BOS SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo

Tahun	Jumlah Siswa	Jumlah Dana BOS	Keterangan
2018	473 Orang	Rp 75,680,000	TW I
	476 Orang	Rp 152,320,000	TW II
	472 Orang	Rp 75,520,000	TW III
	476 Orang	Rp 76,160,000	TW IV
2017	473 Orang	Rp 75,680,000	TW I

⁶Wisnu Djodjoningrat, *Pedoman Pembuatan Administrasi Kepala Sekolah/Madrasah Disusun Berdasarkan Perundang-Undangan Dan Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia*, Pelangi Nusantara, Indonesia, 2015, hal, 333.

⁷Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, UGM Press, Yogyakarta, 2005, hal, 236.

⁸Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: mengelola lembaga pendidikan secara mandiri*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2016, hal, 225.

	475 Orang	Rp 152,000,000	TW II
	475 Orang	Rp 76,000,000	TW III
	472 Orang	Rp 75,520,000	TW IV
2016	474 Orang	Rp 75,840,000	TW I
	474 Orang	Rp 152,000,000	TW II
	473 Orang	Rp 75,680,000	TW III
	473 Orang	Rp 75,680,000	TW IV

Sumber : Data Dana BOS dari Tahun 2016-2018.

Dalam mencari jumlah dana BOS per siswa yaitu dengan menggunakan rumus = TW I 20%, TW II 40%, TW III 20%, dan TW IV 20%. Yaitu dengan cara jumlah siswa x 800 x 20% untuk TW I, TW III, TW IV, atau TW II 40% = Maka dapatlah hasil dana BOS per peserta didik/ per siswa. Kenapa di TW II berbeda, dikarenakan di TW II ada dana tersendiri yaitu dana buku sebesar Rp. 75,000,000 per tahun. Keterangan: TW= Triwulan

Diduga yang terjadi dilapangan mengenai pengelolaan dana BOS yaitu: terjadinya keterlambatan pencairan dana BOS, karena adanya hambatan teknis oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat. Di SDN 104/II Sungai Pinang pihak sekolah kekurangan tenaga administrasi dalam mengelola penerimaan/pengeluaran dan pertanggungjawaban dana BOS. Hal ini dibuktikan adanya pengalihan tugas dan jabatan dengan mengangkat guru sebagai Bendahara. Dikarnakan bendahara sudah tua, jadi dalam masalah teknologi kurang menguasai dengan baik maka dialihkan ke Operator sekolah.

Diduga dalam pelaksanaan yang terjadi dilapangan tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tidak berjalan sesuai dengan indikator yang berlaku, dalam indikator transparan harus adanya keterbukaan tentang posisi Dana Bantuan Operasional Sekolah, disini tidak selalu diumumkan tentang posisi keuangan itu digunakan, hal ini lah yang menjadi masalah masih banyaknya wali murid dan masyarakat tidak mengetahui pasti kemana saja dana itu digunakan.

Diduga dalam pelaksanaan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah juga tidak sesuai dengan indikator akuntabilitas, dalam indikator akuntabilitas harus adanya penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan pemasukan dan pengeluaran keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah baik melalui media massa, maupun media komunikasi personal. Diduga yang terjadi dilapangan tidak adanya penyebarluasan informasi, baik itu informasi pemasukan dan pengeluaran. Contohnya tidak adanya papan pengumuman tentang rincian penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah .

Berdasarkan pengamatan dilapangan terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, diantaranya:

Ada dugaan tidak terbukanya tentang posisi Dana Bantuan Operasional Sekolah; Ada dugaan tidak adanya penyebarluasan informasi mengenai keputusan Dana Bantuan Operasional Sekolah, baik melalui media massa, maupun personal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaiman penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo? Apa hambatan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo? Apa upaya dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo. Untuk mengetahui hambatan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian administrasi adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi.⁹ Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan gambaran tentang Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo.

Adapun populasi pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah SDN 104/II Sungai Pinang, Guru, Staff Tata Usaha, Operator Sekolah, Wali Murid SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo. Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik penelitian dengan cara memakai teknik *purposive sampling*. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah SDN 104/II Sungai Pinang;
- b. 3 Orang Guru SDN 104/II Sungai Pinang;
- c. 1 Orang Tata Usaha SDN 104/II Sungai Pinang;
- d. Operator Sekolah SDN 104/II Sungai Pinang;
- e. Komite Sekolah SDN 104/II Sungai Pinang;
- f. 3 Orang Wali murid SDN 104/II Sungai Pinang.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Hasil kajian dan pembahasan tentang Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 104/II Sungai Pinang berpedoman pada petunjuk penggunaan dana BOS, hal ini dibenarkan adanya buku petunjuk teknis tentang dana BOS di sekolah ini. Bahwa dalam prosesnya melibatkan Guru dan Komite Sekolah. Tetapi tidak melibatkan Wali Murid dan Masyarakat. Di sini penulis menulis masalah berdasarkan indikator yang ada di teori transparansi dan akuntabilitas.

1. Transparansi

a. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran)

Didalam proses penganggaran keuangan dana bantuan operasional sekolah di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo sudah sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mana melibatkan guru, staff tata usaha, komite.

Dugaan masalah yang penulis amati melalui observasi di lapangan mengindikasikan bahwa tidak transparannya tentang dana bantuan operasional sekolah

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 3.

terhadap wali murid. Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menanyakan langsung kepada kepala sekolah tentang transparansi dana BOS itu sendiri.

Keuangan sekolah adalah sebagai pengelola atas fungsi-fungsi keuangan, yakni fungsi bagaimana pihak manajemen mampu menghimpun dana dan mengalokasikan dana tersebut sehingga tujuan organisasi pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam hal ini keuangan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran.

Penulis menanyakan tentang apakah pengeluaran dana BOS sudah sesuai dengan juknis yang dikeluarkan pemerintah, dan mereka menjawab dan mengatakan: "...Bahwa kami menggunakan dana BOS sesuai dengan juknis yang dikeluarkan pemerintah tanpa ditambah-tambah ataupun dikurangi satu pun."¹⁰

Lalu penulis menanyakan tentang keterbukaan dalam proses penganggaran tentang dana BOS yang dilakukan SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo yang mengatakan bahwa: "...Keuangan dana BOS digunakan untuk pembiayaan sekolah seluruhnya, kami tidak pernah memungut biaya sepeserpun kepada peserta didik."¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan dana BOS di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo sudah dikatakan sesuai dengan juknis.

Kemudian penulis menanyakan lagi kepada kepala sekolah, Operator, staff tata usaha, dan guru tentang kemana sajakah keuangan dana BOS itu digunakan, dan mereka mengatakan: "...Bahwa dana BOS digunakan seluruhnya untuk keperluan sekolah, baik itu keperluan pembelajaran maupun kegiatan sekolah."¹²

Dan dibenarkan oleh Operator sekolah SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo yang menyatakan: "... Bahwa keuangan BOS digunakan untuk belanja barang dan jasa. Belanja barang disini adalah belanja barang habis pakai sedangkan jasa adalah layanan yang dilakukan oleh sekolah. Contoh jasa di sini adalah pembayaran internet, belanja listrik, belanja jasa kerja."¹³

Berdasarkan wawancara di atas, pihak sekolah sepakat mengatakan keuangan BOS digunakan untuk pembelian barang dan jasa. dibuktikan dengan rincian pengeluaran dana BOS, yang penulis lampirkan di lampiran.

b. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran

Maksud diumumkan setiap kebijakan adalah, setiap yang ingin membeli barang dengan menggunakan dana BOS harus dirapatkan terlebih dahulu yang dimasukkan kedalam RKAS. Supaya semua pihak sekolah mengetahui setiap kebijakan pengeluaran tentang keuangan dana BOS.

Berdasarkan wawancara bersama yang menyatakan: "... Bahwa dalam menyusun RKAS saya selaku kepala sekolah mengajak seluruh guru yang ada di sekolah rapat untuk mengusulkan apa saja keperluan sekolah yang ingin dibeli."¹⁴

Keterbukaan dalam perencanaan dana BOS yang dilakukan SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo yaitu dengan membuat RKAS, proses pembuatan RKAS yaitu guru, operator, staff tata usaha membuat usulan terlebih dahulu yang disetujui oleh kepala sekolah sesuai dengan juknis yang dikeluarkan pemerintah.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Gustinar, Kepala Sekolah SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

¹¹ Hasil wawancara dengan Gustinar, Kepala Sekolah SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 18 Maret 2019.

¹² Hasil wawancara dengan Gustinar, Kepala Sekolah SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

¹³ Hasil wawancara dengan Jiko Julianda, Operator Sekolah SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Gustinar, Kepala Sekolah SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

Berdasarkan wawancara penulis menanyakan tentang apa saja yang dibelanjakan dalam usulan RKAS, dan mereka menjawab: “....Bahwa dalam RKAS kami membeli belanja barang dan jasa dan ada juga belanja modal yang mana uraiannya dituangkan dalam RKAS.¹⁵

“....Bahwa RKAS dibuat sebelum tahun ajaran, yang terlibat dalam pembuatan RKAS adalah guru, staff tata usaha, dan operator sekolah. Dari RKAS terbagi tiga belanja yaitu belanja barang, belanja jasa dan belanja modal.¹⁶

Berdasarkan wawancara diatas penulis membuat kesimpulan bahwa dalam pembuatan RKAS melibatkan guru, staff tata usaha, operator dan RKAS membeli belanja barang dan jasa saja yang mana rincian RKAS dituliskan dilampiran.

Kemudian penulis menanyakan kepada wali murid apakah wali murid diikutkan dalam pembuatan RKAS, lalu mereka menjawab: “....Kami tidak diikutkan dalam proses pembuatan RKAS, yang membuat kami tidak tau kemana saja dana BOS itu digunakan.¹⁷

Berdasarkan wawancara bersama wali murid diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam pembuatan RKAS, wali murid tidak diikut sertakan dan itu lah yang menyebabkan wali murid tidak mengetahui apa saja yang dibuat dalam RKAS setahun kedepan.

c. Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggran (yang telah diaudit)

Maksud data yang sudah diaudit adalah data yang sudah dibuat lalu dilaporkan kepada seluruh guru atau sekolah maupun pihak yang berwenang. Kalau dipublikasikan disini tidak dipublikasikan baik itu ditempel di mading atau pun bentuk media lainnya.

Berdasarkan wawancara bersama yang menyatakan: “....Kalau di publikasikan kami di sini tidak dalam bentuk apa pun tetapi jika melihat data yang diinginkan kami selalu terbuka untuk yang berkepentingan atau yang membutuhkan.¹⁸

Berdasarkan wawancara bersama wali murid yang menyatakan bahwa: “.... Tidak, kami tidak pernah melihatnya dalam bentuk apapun.¹⁹

Lalu penulis menanyakan lagi tentang bagaimana atau dengan cara apa pihak sekolah mempublikasikan dana BOS yang sudah diaudit, dan merekapun menjawab: “....Bahwa kami tidak mempublikasikan tentang dana BOS kepada siapa saja.²⁰

¹⁵ Hasil wawancara dengan Jiko Julianda, Operator SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Uli Fitriani, Guru SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 25 Mei 2019.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Harlayani, Wali Murid SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 25 Mei 2019.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Gustinar, Kepsek SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 25 Mei 2019.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Harlayani, Wali Murid SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 25 Mei 2019.

²⁰ Hasil wawancara dengan Gustinar, Kepsek SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

Dan dibenarkan oleh guru, operator yang menyatakan: “.....Bahwa memang sekolah ini tidak mempublikasikan data tentang dana BOS, tetapi kami siap memberi data jika ada yang menannyakan tentang data itu.²¹

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pihak sekolah tidak mempublikasikan tentang dana BOS baik itu dalam bentuk apapun, tetapi pihak sekolah memiliki data jika ada yang membutuhkan.

d. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.

Maksud terbuka informasi tentang pembelanjaan aktual adalah benar-benar adanya apa saja yang dibelikan tentang dana BOS. Disini kami jika membeli sesuatu harus disertakan kwitansi.

Berdasarkan wawancara bersama guru yang menyatakan: “.....Bahwa jika kami ingin membeli sesuatu harus disertakan kwitansi sebagai laporan ke bendahara.²²

Berdasarkan wawancara bersama guru diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam dalam pembelanjaan harus disertakan kwitansi.

2. Akuntabilitas

a. Adanya penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa maupun komunikasi personal.

Maksud dari penyebar luasan informasi disini adalah informasi tentang dana BOS mudah dilihat oleh wali murid dan orang berkepentingan. Dalam hal ini masyarakat masih sulit mendapatkan informasi yang akurat tentang dana bantuan operasional sekolah salah satu contohnya dikarnakan tidak dibuatnya papan pengumuman tentang rincian pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah.

Berdasarkan wawancara bersama dengan staff tata usahayang menyatakan : “.....Bahwa dalam penyebarluasan informasi kami disini tidak ada, akan tetapi kami tersedia bagi yang membutuhkan.²³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo tidak disebarluaskan dan itulah menyebabkan banyak wali murid tidak mengetahui kemana keuangan itu digunakan.

b. Adanya akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Prinsip akuntabilitas memberikan pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh pengaku kepentingan dan informasi dalam kebijakan pengelolaan dana BOS di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo melakukan penyebaran informasi tersebut melalui rapat internal, baik yang dilakukan oleh guru, staff tata usaha, atau pun operator. Dari hasil informasi mengenai kebijakan pengelolaan keuangan di sekolah, tentunya ada saja hal yang menjadi keluhan atau yang diduga jadi masalah yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan, sekolah harus dapat menampung dan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi. Di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo melalui mekanisme

²¹ Hasil wawancara dengan Maryanti, Guru SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

²² Hasil wawancara dengan Maryanti, Guru SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

²³ Hasil wawancara dengan Bismilahidayati, Staff Tata Usaha SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

pengaduan masyarakat dilakukan dengan cara disampaikan ke Kepala Sekolah melalui rapat. Hal tersebut dijelaskan oleh Bidang Kesiswaan, bahwa adanya pengaduan dari guru ataupun wali murid yang disampaikan dan diselesaikan dalam rapat serta mencari solusinya.

Berdasarkan wawancara bersama dengan guru yang menyatakan: “.....Bahwa iya dalam menyelesaikan masalah yang di lakukan oleh sekolah ini dengan mengadakan rapat dan diselesaikan dengan cara baik baik.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo memiliki tempat pengaduan jika terjadi permasalahan dan jika permasalahan itu berat diadakan rapat dan diselesaikan dengan mencari solusinya. Sampai menemukan titik hasil yang akan memecahkan masalah yang terjadi. Jika masalah mudah makan saat itu juga dapat diputuskan hasilnya jika sedikit rumit makan akan diberi waktu beberapa hari.

3.2 Hambatan dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada objek penelitian mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah belum terlaksana dengan baik, berdasarkan yang dikemukakan di atas yang disebabkan adanya beberapa hambatan antara lain:

1. Transparansi

a. Tidak adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran)

Kuangan sekolah adalah sebagai pengelola atas fungsi-fungsi keuangan, yakni fungsi bagaimana pihak manajemen mampu menghimpun dana dan mengalokasi dana tersebut sehingga tujuan organisasi pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam hal ini keuangan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran.

Berdasarkan wawancara kepada kepala sekolah SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo mengatakan bahwa: “.....Di dalam keuangan dana BOS kami menggunakan keuangan sesuai kebutuhan yang diinginkan, sesuai dengan juknis.²⁵

Dan dibenarkan oleh guru yang menyatakan bahwa: “.....Iya, di dalam pembagian dana BOS sudah sesuai dengan juknis, tetapi kami memiliki kendala dalam pembagian keuangan itu yang mana kendala nya adalah dana BOS sering terlambat pencairannya yang menyebabkan pembagian posisi keuangan sulit dibagi dengan anggaran yang ada.²⁶

Berdasarkan wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam proses dalam pembagian posisi dana BOS sudah sesuai dengan juknis yang dikeluarkan pemerintah, namun masih ada salah satu komponen yang tidak sesuai dengan juknis. Hal ini yang menyebabkan kurang terbukanya tentang keuangan sekolah di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo. Hal ini dibenarkan adanya bukti tentang Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang penulis tulis dilampiran.

b. Tidak diumumkannya setiap kebijakan anggaran

Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana pemimpin sekolah menghimpun dana dan mendistribusikan sehingga tujuan

²⁴ Hasil wawancara dengan Ariyanti, Guru SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

²⁵ Hasil wawancara dengan Gustinar, Kepsek SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

²⁶ Hasil wawancara dengan Uli Fitriani, Guru SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

sekolah dapat tercapai secara tepat. RKAS adalah rencana kerja anggaran sekolah yang dilakukan untuk 1 tahun kedepan. Namun dalam mengumumkan kebijakan tentang RKAS masih kurang baik.

Berdasarkan wawancara bersama kepada kepala sekolah yang menyatakan bahwa: "...Kendala dalam penyusunan RKAS yaitu terkadang nilai harga yang dibuat jauh berbeda dengan harga aslinya.²⁷

Hal ini dibenarkan oleh staff tata usaha yang menyatakan: "...Bahwa kendala dalam menyusun RKAS harga yang terkadang naik turun yang membuat kami agak kesulitan dalam membatasi keuangannya.²⁸

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pembuatan RKAS adalah harga yang naik turun yang membuat sulit untuk membuat keuangannya.

c. Tidak dipublikasikannya setiap hasil laporan (diaudit)

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS adalah di sini tidak dipublikasikan setiap hasil laporan. Yang mana laporan ini yaitu tentang pembelanjaan yang dibeli dengan menggunakan dana BOS. Kami ingin mempublikasikan hasil laporan dengan membuat papan tentang rincian dana BOS.

Berdasarkan wawancara bersama operator dan guru yang menyatakan: "...Bahwa kami ingin mempublikasikan data dana BOS dengan menggunakan papan tentang dana BOS.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk mempublikasikan dana BOS pihak sekolah harus membuat papan tentang pemasukan dan pengeluaran dana BOS, karna jika dibuat itu akan membuat wali murid lebih mudah mengetahui kemana saja keuangan itu digunakan.

d. Terbukannya informasi tentang pembelanjaan aktual

Pembelanjaan aktual adalah pembelanjaan benar-benar adanya tanpa dibuat buat dan disertai dengan adanya kwitansi. Hambatan yang dialami dalam hal ini yaitu. Berdasarkan wawancara bersama guru yang menyatakan bahwa: "...Bahwa kendala dalam belanja yaitu terkadang kami hanya membeli barang harga murah jadi kami tidak diberi kwitansi.³⁰

Berdasarkan wawancara bersama di atas, penulis menyimpulkan bahwa kendala dalam informasi pembelanjaan aktual yaitu harus disertai kwitansi tetapi disuatu toko masih ada yang tidak memiliki kwitansi. Penulis juga menyimpulkan bahwa kendala dalam informasi aktual disini sering belanja tanpa diberi kwitansi. Yang menyebabkan kami susah untuk melaporkan kepada bendahara.

2. Akuntabilitas

a. Tidak adanya penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa maupun komunikasi personal.

Berdasarkan penerapan prinsip akuntabilitas yang mana harus disebarluaskan informasi mengenai keputusan tetapi di sini tidak ada, salah satu contoh tidak adanya papan pengumuman yang mengatas nama dana BOS.

Berdasarkan wawancara bersama Wali Murid yang menyatakan: "...Bahwa salah satu hambatan dalam penyebarluasan informasi mengenai dana BOS tidak ada baik itu melalui media massa maupun media lainnya. Salah satu contoh tidak adanya papan

²⁷ Hasil wawancara dengan Gustinar, Kepsek SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bismilahidayati, Staff Tata Usaha SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

²⁹ Hasil wawancara dengan Jiko Julianda, Operator SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

³⁰ Hasil wawancara dengan Maryanti, Guru SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 25 Mei 2019.

pengumuman yang mengatasi nama dana BOS baik itu secara rinci maupun hanya besarnya saja. Itu lah yang membuat informasi tidak sampai kepada kami.³¹

Hal ini juga dibenarkan oleh wali murid lainnya yang menyatakan bahwa: “..... Selama anak saya sekolah disini, saya belum pernah melihat adanya papan pengumuman yang mengatas namakan dana BOS, hal ini lah yang menyebabkan kami selaku wali murid tidak mengetahui kemana saja keuangan itu digunakan.³²

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo tidak adanya papan pengumuman yang mengatas namakan dana BOS, dan itu lah yang menyebabkan banyak wali murid tidak mengetahui kemana saja keuangan itu digunakan.

b. Tidak adanya akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Dalam hal ini publik diberi akses untuk memberi pengaduan kepada sekolah jika ada yang ingin di sampaikan. Melalui kepala sekolah lalu dirapatkan kepada seluruh warga sekolah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Dari penjelasan di atas ada dugaan yang dialami wali murid yaitu memiliki hambatan dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah yang menyatakan bahwa: “.....Jika ada wali murid yang ingin mengadukan masalahnya tinggal lapor saja kepada saya, setelah itu kami selaku pihak sekolah harus rapat dulu untuk mencari solusinya. Hambatan yang kami alami terkadang dalam pengaduan wali murid sering tidak mau ikut serta dalam proses rapat.³³

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam pengaduan oleh wali murid, di sini wali murid/masyarakat tidak mau ikut dalam proses rapat yang membuat solusinya agak sulit dipecahkan. Misalnya dalam pemecahan masalah penyusunan RKAS.

3.3 Upaya Yang Sudah Dilakukan Tetapi Hasilnya Belum Maksimal dalam Mengatasi hambatan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo.

Berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dikemukakan di atas, upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut diantara lain:

1. Harus diikuti sertakan perwakilan wali murid dalam proses penggaran dalam posisi keuangan dana BOS.

Keuangan sekolah memiliki rangkaian aktivitas terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran, pengesahan, dan penggunaan anggaran sekolah.

Dalam perencanaan keuangan sekolah, terlebih dalam pelaksanaan pelaporan, tidak lepas dari prinsip pengelolaan keuangan sekolah. Artinya, manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip yang menjadi landasan dari pengelolaan keuangan sekolah. Yang sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisiensi.

Berdasarkan wawancara kepala sekolah SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo mengatakan: “.....Memang sejauh ini kami sudah melakukan proses pembagian posisi dana BOS sesuai dengan juknis yang berlaku, namun masih saja ada kekurangan

³¹ Hasil wawancara dengan Amelia, Wali Murid SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 25 Mei 2019.

³² Hasil wawancara dengan Harlayani, Wali Murid SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 25 Mei 2019.

³³ Hasil wawancara dengan Gustinar, Kepsek SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, 24 Mei 2019.

dalam pembagian keuangan tersebut sehingga masih ada salah satu poin yang tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan rencana”.³⁴

Berdasarkan wawancara kepada operator sekolah di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo mengatakan: “....Bahwa salah satu kendala dalam mewujudkan posisi keuangan sekolah yaitu sering keterlambatan pencairan dana BOS, terkadang dana itu tidak sama jumlah besaran keluarnya, jadi mempersulit untuk pembagian keuangannya tepat waktu dan tepat sasaran”.³⁵

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam proses pembagian posisi keuangan dana BOS yaitu sering keterlambatan pencairan dana BOS dan kegiatan di bagian jasa sering berubah-ubah .

2. **Harus dibuatnya papan pengumuman tentang dana Bantuan Operasional Sekolah**

Demi terciptanya hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan *stakeholder*, maka harus dibuatnya papan pengumuman yang menyatakan tentang dana BOS baik secara rinci maupun hanya sekedar besarnya saja.

Berdasarkan wawancara bersama yang menyatakan: “....Bahwa kami ingin adanya papan pengumuman tentang dana BOS, supaya kami mengetahui kemana dana BOS digunakan”.³⁶

“....Bahwa kami ingin ada penyebar luasan informasi baik melalui media massa maupun personal. Contoh salah satu nya harus dibuat papan pengumuman tentang pemasukan dan pengeluaran dana BOS, tidak harus rinci hanya besarnya saja sudah jadi”.³⁷

Dari pernyataan di atas, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa jika dibuat papan tentang rincian dana BOS baru lah dikatakan adanya transparansi dan akuntabilitas tentang keuangan dana BOS di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo karna dibuktikan dengan ada rincian dan pengeluaran yang dituliskan pada papan pengumuman dana BOS.

3. **Setiap pembelian barang keperluan sekolah harus disertakan kwitansi**

Hal ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap sekolah dalam pembelanjaan harus disertakan kwitansi. Supaya sekolah bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di sekolahnya masing-masing. Jika ada kwitansi akan mempermudah bendahara dalam membuat laporan tentang BOS.

Berdasarkan wawancara bersama operator yang menyatakan bahwa: “... Iya jika disertai dengan kwitansi, akan mempermudah kami dalam membuat laporan tentang BOS. Jika salah satu tidak ada akan mempersulit kami dalam membuat laporan yang dikarnakan akan berselisih harga.

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa di dalam pembelanjaan pihak sekolah harus disertai kwitansi yang mana kwitansi tersebut akan mempermudah kami dalam membuat laporan.

4. **Dalam penyusunan RKAS harus dirapatkan terlebih dahulu kepada seluruh warga sekolah.**

Dalam penyusunan RKAS memang melibatkan kepala sekolah, bendahara, operator, guru dan staff tata usaha supaya mempermudah proses pembelajaran setahun kedepan. Dengan diikut sertakan seluruh warga sekolah makan akan transparan dan akuntabilitas dalam penyusunan RKAS di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo.

³⁴Hasil wawancara dengan Gustinar, Kepala Sekolah SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, tanggal 18 April 2019.

³⁵Hasil wawancara dengan Jiko Julianda, Operator Sekolah Di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, tanggal 20 Maret 2019.

³⁶ Hasil wawancara dengan Harlayani Sudarto, Perwakilan Wali Murid di SDN 104/II Sungai Pinang Mura Bungo, tanggal 4 April 2019.

³⁷ Hasil wawancara dengan Eka Zuarnita, Perwakilan masyarakat di sekitaran SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, tanggal 4 April 2019.

5. Harus terbuka dalam penyebaran informasi melalui media massa

Dalam penyebaran informasi di sini harus dilihat oleh komite dan warga sekolah, supaya pihak sekolah atau pihak mana pun mampu mengerjakan. Tetapi di sekolah ini tidak disebar melalui media massa, tetapi mereka hanya digunakan data untuk keperluan yang membutuhkan bagi kepentingan. Karna keuangan merupakan bagian yang sensitive di dalam sekolah, maka dari itu lah tidak dipublikasikan melalui media massa.

6. Harus diumumkan hasil laporan yang sudah diaudit

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS adalah tidak dipublikasikan setiap hasil laporan yang sudah diaudit. Maka dari itu harus diumumkan kepada wali murid data yang sudah diaudit supaya dikatakan transparansi dan akuntabilitas atas Dana BOS tersebut. Supaya tidak ada kesenjangan sosial terhadap sesama.

4. Kesimpulan dan Saran

1. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo sudah sesuai dengan juknis yang berlaku. Dimana dalam proses penganggaran melibatkan Guru, Staff Tata Usaha dan komite sekolah. Tetapi Wali Murid Dan Masyarakat tidak diikutsertakan dalam rapat dan proses penyusunannya. Penerapan transparansi juga belum sesuai dengan salah satu indikator, di mana di dalam indikator harus adanya keterbukaan tentang posisi keuangan dana BOS tetapi di sini tidak selalu diumumkan tentang posisinya itu yang menyebabkan masih banyak wali murid dan masyarakat tidak mengetahui pasti kemana saja keuangan itu digunakan. Dan begitu juga dengan indikator akuntabilitas dimana harus adanya penyebaran informasi suatu keputusan tentang dana BOS tetapi di sini tidak disebarluaskan baik itu melalui media massa maupun media bentuk apapun.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, diantaranya adalah: (a) tidak adanya keterbukaan tentang posisi dana Bantuan Operasional Sekolah, dan (b) tidak adanya penyebaran informasi mengenai keputusan dana bantuan oprasional sekolah baik melalui media massa, maupun personal. Contoh papan pengumuman dana BOS.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo, diantaranya adalah: (a) harus diikut sertakan perwakilan wali murid maupun masyarakat dalam proses penggaran dalam posisi keuangan dana bantuan oprasional sekolah, (b) harus di buatnya papan pengumuman tentang dana Bantuan Operasional Sekolah, (c) dalam pemebelanjaan harus disertakan kwitansi, (d) dalam penyusunan RKAS harus melibatkan warga sekolah (e) harus terbuka dalam penyebaran informasi yang telah diaudit, (f) harus terbuka dalam penyebaran informasi melalui media massa.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo jika ingin dikatakan transparans tentang keuangan harus diikut sertakan wali murid dan masyarakat dalam proses penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah.
2. Bagi pemerintah semoga dana Bantuan Operasional Sekolah lancar setiap Triwulan, tidak ada keterlambatan lagi.
3. Dalam pembuatan RKAS harus melibatkan warga sekolah.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, memotivasi dan berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini diantaranya yaitu Kepala Sekolah SDN 104/II Sungai Pinang, Guru, Staff Tata Usaha, Operator Sekolah, Wali Murid SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo dalam memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian untuk ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, semoga kedepannya LPPM semakin baik, dan kepada semua rekan-rekan yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun baik materil dan nonmateril demi terlaksananya dan bisa menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan menjadi berkah dan dibalas oleh ALLAH SWT. Amin.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Agus Dwiyanto (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- E-Mulyasa (2006) *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sri Minarti. (2016). *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Adminidrasi*. Bandung : Alfabeta..
- WisnuDjoyodiningrat. (2015) *Pedoman Pembuatan Administrasi Kepala Sekolah/Madrasah Disusun Berdasarkan Perundang-undangan Dan Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia*, Indonesia: Pelangi Nusantara.

PeraturanPerundang-undangan.

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014*.
- Perundangan tentang *Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional*, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2013
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidik Nasional*, Mini Jaya Abadi, Jakarta, 2003.